

**Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia,
dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akt)



OLEH :

MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN

5552180134

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN AKUNTANSI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG BANTEN

2024

PERSETUJUAN PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Skripsi dengan judul:

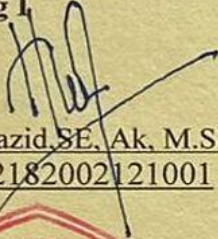
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi

Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan:

LULUS

Pada Hari Senin, Tanggal 24, Bulan Juni, Tahun 2024,
Oleh Dewan Penguji
Serang, 24 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Helmi Yazid, SE, Ak, M.Si, CA., CPA
NIP. 197012182002121001

Pembimbing II



Mazda Eko Sri Tjahyono., S.Pd, SE., M. Akt NIP.
198307022014041001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE, MM, Ak, CA,
CMA
NIP. 197312302001121001

Mengetahui,


Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Windu Mulyasari, SE, Ak., M.Si., CSRS.,
CSRA
NIP. 197612092006042001

DEWAN PENGUJI

1. Mazda Eko Sri Tjahyono., S.Pd, SE., M. Akt
NIP. 198307022014041001
(Ketua Penguji)



.....
(tanda tangan)

29/7'24
.....
(tanggal ttd)

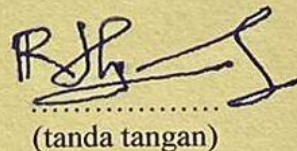
2. Dr. E Munawar Muchlish, S.E., Ak., M.Si.,
CA., ACPA., ASEAN CPA
NIP. 197509092005011002
(Penguji 1)



.....
(tanda tangan)

29/7'24
.....
(tanggal ttd)

3. Roza Mulyadi, S.E., Ak., M. Akt., CA., CPA.,
CSRS., ASEAN CPA
NIP. 198202212014041001
(Penguji 2)



.....
(tanda tangan)

24/7'24
.....
(tanggal ttd)

Nama : Muhammad Fajar Ramadhan
No. Induk Mahasiswa : 5552180134
Jurusan : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S-1)

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis Skripsi berikut:

Judul : Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan
Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia,
dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi

Nama Mahasiswa : Muhammad Fajar Ramadhan

NIM : 5552180148

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut di atas adalah benar benar hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan yang secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini.

Serang, 22 Juli 2022



Muhammad Fajar Ramadhan

5552180148

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan beribu nikmat, kesehatan, kesabaran, dan kekuatan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk: Mama Suryantina Syafura, Bapak Eka Rosatiawan Rosadi dan kakak Muhammad Bhakti Wiguna atas segala do'a, dukungan, serta kepercayaan yang selalu diberikan sehingga menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk diriku sendiri, Muhammad Fajar Ramadhan, atas segala perjuangannya sampai ada di titik ini, kamu hebat, semoga semangat nya tidak sampai disini saja!

LEMBAR MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya...”*

(Al-Baqoroh: 286)

*"Kamu seharusnya tidak menyerah terhadap apapun yang terjadi padamu.
Maksudku, kamu seharusnya menggunakan apapun yang terjadi padamu sebagai
alat untuk naik, bukan turun."*

(Bob Marley)

*“Kesalahan adalah pengalaman hidup, belajarlh darinya. Jangan emmbuang
waktumu untuk menjadi sempurna.”*

(Muhammad Fajar Ramadhan)

ABSTRAK

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi

Muhammad Fajar Ramadhan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi wajib dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang diberikan oleh rekomendasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Namun fakta berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 bahwa tidak semua rekomendasi BPK RI dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pelaksanaan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2020 wajib dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang merekomendasikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak rekomendasi diberikan, kemudian jawaban atau penjelasan pejabat atas rekomendasi ditelaah untuk disetujui oleh anggota BPK RI perwakilan Provinsi untuk menentukan dalam klasifikasi apakah terhadap tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi. Terhadap rekomendasi yang tidak dilaksanakan, BPK RI perwakilan Provinsi akan berakibat pada opini yang diberikan oleh BPK RI. Kedua upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2020 dilakukan oleh BPK RI perwakilan Provinsi dengan melakukan komunikasi yang intensif kepada pejabat yang bersangkutan dan meminta kepada DPRD untuk ikut serta mengawasi penyelesaian tindaklanjut, selanjutnya upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Inspektorat dengan berbagai cara karena inspektorat juga bagian dari tim pelaksana tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi.

Kata Kunci: Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi

ABSTRACT

The Influence of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, Human Resource Competency, and Internal Control Systems on the Quality of Jambi Provincial Government Financial Reports

Muhammad Fajar Ramadhan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Follow-up to the results of BPK RI audit results from Provincial representatives must be carried out by Regional Government officials who are provided with recommendations based on the provisions in Article 3 of the Supreme Audit Agency Regulation Number 2 of 2017 concerning Monitoring the Implementation of Follow-Up Recommendations on Audit Results of the Financial Audit Agency of the Republic of Indonesia. However, the facts are based on data obtained from the Audit Results Report of the BPK RI Jambi Province Representative on the 2020 Jambi Province Regional Government Financial Report that not all BPK RI recommendations were implemented by Jambi Province Regional Government Officials. This research is a type of empirical juridical research. The results of the research show that first, the implementation of the results of the examination by the Republic of Indonesia Financial Audit Agency, Representative of Jambi Province, on the 2020 Jambi Province APBD must be carried out by the recommended Regional Government official within 60 (sixty) days from the recommendation being given, then the official's answer or explanation regarding The recommendations are reviewed for approval by BPK RI members representing the Province to determine in classification whether follow-up actions have been carried out in accordance with the recommendations. For recommendations that are not implemented, the BPK RI Provincial representative will have an impact on the opinion given by the BPK RI. The two efforts made to improve the implementation of the follow-up to the audit results of the Audit Board of the Republic of Indonesia Representative of Jambi Province on the 2020 Jambi Province APBD were carried out by BPK RI, the representative of the Province by carrying out intensive communication with the officials concerned and asking the DPRD to participate in supervising the completion of the follow-up , further efforts were made by the Regional Government through the Inspectorate in various ways because the inspectorate was also part of the implementation team for following up on the results of the BPK RI audit by provincial representatives.

Keywords: Influence of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, Human Resource Competency, and Internal Control System on the Quality of Jambi Provincial Government Financial Reports

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi”**. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE, MM, Ak, CA, CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dr. Windu Mulyasari, S.E., M.Si., CSRS., CSRA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Kurniasih Dwi Astuti, S.E., Ak., M.Akt., CA selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisni
5. Bapak Dr. Helmi Yazid, S.E., Ak., M.Si., CA, CPA Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Mazda Eko Sri Tjahjono.,SPd,SE., M.Akt., selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten yang telah banyak

memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.

8. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten yang telah banyak membantu penulis dalam bidang keadministrasian.
9. Kepada orang tuaku tercinta Ayah Eka Rosatiawan Rosadi dan Ibunda Suryantina Syafura dan Abang M. Bhakti Wiguna yang telah mendukung penulis dalam memberikan cinta dan kasih sayang, dorongan semangat, nasehat, serta do'anya kepada penulis.
10. Teman-teman seangkatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan ibu serta teman-teman, semoga skripsi ini bermanfaat, amin ya rabbal alamin.

Serang, Maret 2024

Penulis

Muhammad Fajar Ramadhan

5552180134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN	iii
LEMBAR MOTTO PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR ISI TABLE	xiii
DAFTAR ISI GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	13
2. Kualitas Laporan Keuangan	15
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	18
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi	19
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia	20
6. Sistem Pengendalian Internal	21
B. Studi Relevan.....	22

1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	26
2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	27
3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	29
4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	32
C. Data dan Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	34
1. Definisi Operasional Variabel	34
2. Pengukuran Variabel Penelitian	37
F. Uji Instrumen Penelitian	38
1. Uji Validitas	38
2. Uji Reliabilitas.....	39
G. Teknik Analisis Data	40
1. Uji Asumsi Klasik	40
2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	42
3. Pengujian Hipotesis.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian	47
1. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi	47
2. Karakteristik Responden	49
B. Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	53
1. Hasil Uji Validitas	53
2. Hasil Uji Reliabilitas	55
C. Distribusi Jawaban Responden	56
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	62
1. Hasil Uji Normalitas.....	63

2. Uji Multikolinearitas	64
3. Uji Heteroskedastisitas	65
4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	66
E. Nilai Koefisien Determinasi (R^2).....	69
F. Hasil pengujian Hipotesis	71
1. Pengujian Kelayakan Model (Hasil Uji F).....	71
2. Pengujian Hipotesis (Uji t).....	72
G. Pembahasan	76
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan.....	82
B. Keterbatasan Penelitian	82
C. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR ISI TABLE

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 3. 2 Skala Pengukuran.....	38
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	50
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	51
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Fungsional Auditor.	51
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	52
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas.....	53
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas	55
Tabel 4. 8 Distribusi Jawaban Responden Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.....	56
Tabel 4. 9 Distribusi Jawaban Responden Variabel Teknologi Informasi.....	58
Tabel 4. 10 Distribusi Jawaban Responden Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia	59
Tabel 4. 11 Distribusi Jawaban Responden Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	60
Tabel 4. 12 Distribusi Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan	61
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas Data	63
Tabel 4. 14 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	65
Tabel 4. 15 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda	66
Tabel 4. 16 Nilai Koefisien Determinasi (R^2).....	71
Tabel 4. 17 Hasil Uji F.....	72
Tabel 4. 18 Perbandingan Antara Nilai t hitung Dengan t tabel	73
Tabel 4. 19 Standardized Coefficient Beta.....	75

DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	31
Gambar 4. 1 Scatter Plot	64
Gambar 4. 2 Hasil Pengujian Heterokedastisitas	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai badan hukum publik, memiliki tujuan yang wajib diembannya sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan itu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut tidak dapat terlaksana bila tidak ditopang dengan keuangan negara sebagai sumber pembiayaannya. Dengan demikian, keuangan negara sangat memegang peranan penting untuk mewujudkan tugas negara yang merupakan tanggung jawab pemerintah. (Djafar, 2017).

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Amandemen UUD Negara RI 1945 menghasilkan penataan ulang sistem pemerintahan negara RI. Hal tersebut berpengaruh terhadap kewenangan rezim hukum keuangan negara sehubungan dengan perubahan format kelembagaan dan hubungan kewenangan dalam sistem organisasi pemerintahan. Terdapat keinginan yang kuat untuk mengatur sistem pertanggungjawaban secara lebih jelas mengenai keuangan negara. Hal itu menyangkut penataan di tingkat lembaga tinggi negara dengan menempatkan posisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan *fiscal controlling* yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lain. (Tjandra, 2006).

Otonomi sebagai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta aspirasi daerah harus diletakkan juga dalam kerangka pembiayaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Tanpa pelimpahan keuangan, otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diterangkan bahwa ada penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas. Adapun tiga asas otonomi daerah adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pemerintah Pusat bersama DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah pada pertengahan Desember 2021, yang kemudian diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. Undang – Undang ini berbeda dengan Undang-Undang

yang digantikannya karena isinya meliputi banyak hal terkait keuangan daerah, yaitu : 1) Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) Pengelolaan TKD (transfer ke daerah); 3) Pengelolaan belanja daerah; 4) Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dengan demikian, otonomi daerah tidak hanya memberikan kewenangan atas pelaksanaan pembangunan tetapi juga dibarengi dengan kewenangan untuk mengelola keuangannya. Dengan kebebasan melalui otonomi tersebut, diharapkan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia secara merata dan adil.

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berada di luar kelompok eksekutif dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara yang berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Jadi kualitas laporan keuangan menjadi salah bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan negara.

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dalam suatu periode untuk menggambarkan tentang kondisi keuangan suatu organisasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan bagi para pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dapat

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurut Lutfiati et al., (2021), Laporan keuangan juga merupakan media yang paling penting untuk dijadikan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan dalam sektor privat maupun sektor publik tentang bagaimana suatu organisasi akan berjalan kedepannya.

Dalam sektor publik yang menjadi fokus adalah instansi pemerintah seperti Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah mengeluarkan laporan keuangan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Laporan keuangan penting bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas laporan keuangan agar dapat mudah dipahami penggunanya, mempunyai pengungkapan yang cukup, disajikan secara wajar, jujur apa adanya serta memenuhi karakteristiknya sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Yusrianti et al., 2021). Untuk dapat mendukung keberhasilan penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan diperlukan sumber daya manusia yang kompeten yang dapat memahami secara rinci sistem akuntansi (Nilamsari et al., 2020).

Hal pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Standar Akuntansi Keuangan (Nugraheni dan Subaweh, 2008). Standar Akuntansi Pemerintah mempunyai peran sebagai pengatur penyajian laporan keuangan dalam peningkatan laporan keuangan. Penerapan SAP mewajibkan entitas pelapor, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah menyiapkan segala bentuk kegiatan yang dilakukan selama periode bersangkutan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Baik maupun buruknya sebuah laporan keuangan tidak akan terlepas dari penerapan SAP yang dijalankan dengan tertib. Hasil penelitian Kusumah (2012) dan Fikri (2015). memberikan kesimpulan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber daya manusia yang kompeten merupakan unsur terpenting dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk mencapai tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien. Tinggi atau rendahnya kompetensi setiap individu dalam bidangnya akan berpengaruh terhadap kontribusi dan kinerjanya dalam menyusun laporan keuangan. Kekeliruan atau kesalahan apapun bisa saja terjadi apabila sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan kurang berkompeten dibidangnya (Satriawan dan Dewi, 2020). Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten maka dalam penyusunan laporan keuangan akan dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang

kompeten memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai hal-hal yang harus dikerjakan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan pemerintah daerah. Namun, dalam pengimplementasian teknologi informasi tidaklah mudah. Semakin maju teknologi informasi saat ini berpengaruh pada bidang akuntansi (Nilamsari et al., 2020). Apabila teknologi informasi dimanfaatkan secara maksimal maka dalam pengimplementasikan teknologi informasi tidak akan sia-sia dan dapat memperkecil biaya yang akan dikeluarkan. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta memenuhi karakteristiknya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Menurut Ardianto dan Eforis (2019) dengan adanya teknologi informasi tentunya dapat memberikan kemudahan kepada organisasi, proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara komputerisasi serta komputer yang didukung dengan penggunaan aplikasi (*software*) dapat meminimalisir kesalahan pencatatan. Teknologi informasi juga membantu dalam

mempercepat pemrosesan transaksi, membantu penyiapan laporan, meningkatkan ketepatanwaktuan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern (Sukmaningrum, 2012). Tujuan penerapan sistem pengendalian intern adalah tercapainya laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan sitem pengendalian intern yang meliputi antara lain menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya, menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi sehingga dengan berjalannya seluruh tahapan pengendalian internal tersebut maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas (Santoso, 2016).

Dalam laporan BPK Republik Indonesia Provinsi Jambi juga melampirkan rekomendasai kepada Gubernur atas permasalahan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi wajib pula menerima atas tindaklanjut dari rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas permasalahan tersebut di atas. Akan tetapi rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur atas hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini diperoleh dari laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Perwakilan Provinsi Jambi Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi atas APBD Provinsi Jambi Tahun 2020 yang dituangkan dalam penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kota Jambi?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kota Jambi?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kota Jambi?
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kota Jambi?

5. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kota Jambi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kota Jambi
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kota Jambi
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kota Jambi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan penelitian secara teoritis dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu administrasi sekaligus menjadi bahan referensi atau acuan dalam penulisan bidang yang sama.
2. Kegunaan penelitian secara praktis dapat menambah referensi bahan keperustakaan dan bahan bacaan mengenai pelaksanaan tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kota Jambi ditinjau dari penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktik lapangan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baik bagi penulis maupun pembaca
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan dibidang Akuntansi Pemerintahan.

- c. Kegunaan penelitian secara praktis dapat menambah referensi bahan ke perpustakaan dan bahan bacaan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Kegunaan Praktis

1. Mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang di peroleh.
2. Hasil penelitian ini di harapkan juga dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai Akuntansi mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Afrizal, Accounting Theory (Teori Akuntansi) (Jambi: : Salim Media Indonesia (Anggota IKAPI) (2018).
- Alvin A. Arens Mark S. Beasley, Randal J. Elder, Auditing & Jasa Assurance, Erlangga, (2014).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung, (2008).
- Budi Rahardjo. Keuangan Akuntansi, Yogyakarta: Graha Ilmu (2007)
- David, Sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Provinsi Jambi, tanggal 14 Juli 2020
- Davidson, Stickney dan Weil, Manajemen laba dan teori empiris, Jakarta: Grasindo (2018)
- Eko Raharjo, “Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi” 2, no. 1 (2007).
- Fauziah, Ifat. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Ilmu Media (2018)
- Ifat Fauziah, SAP Standar Akuntansi Pemerintahan (Jakarta: Penerbit Ilmu, 2018).
- Indra Bastian, Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Yogyakarta: BPFE, (2009).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, (2010)
- M. Djafar Saidi dan Eka M Djafar, Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik, Ctk. Kelima, Rajagrafindo Persada, Jakarta, (2017)
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, (2009).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Saut Maruli Tua Siringoringo, Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Tanggal 24 Juni 2020.
- Supriyono, R. A, Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta: UGM PRESS (2018).

Sutabri, Tata, *Analisa Sistem Informasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta (2004)

Tata Sutabri, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Andi, (2004).

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta (2015).

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, (2006).

Jurnal

Ardianto Rama, Chermian Efforis. (2019) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang). *Jurnal Bina Akuntansi*, Volume VI (1), Januari 2019: 95-136

Harry Apriansyah, Sri Rahayu, dan Misni Erwati, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo” *JAR : Jambi Accounting Review* Vol.1, no. 1 (t.t.).

Khairiyani, dkk “Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan serta implikasinya terhadap Nilai Perusahaan,” *Iltizam Journal Of Shariah Economic Reserch* .Vol 3 No.1.

Lutfiati, & Arif Nugroho Rachman. (2021). Studi Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM di BTC Surakarta. *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 161–176.

Ratmi Dewi dan Jan Hoesada, “The Effect Of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Competence Of Human Resources, And Use Of Information Technology On Quality Of Financial Statements,” *Jurnal Internasional Inovatif dan Studi Lanjut (IJIRAS)* Vol.7 (2020).

Titin Agustin Nengsih & Fani Kurniawan. (2021). Analisis Perbandingan Keputusan Membeli di Pasar Tradisional dan Modern. *Indonesia Journal Of Islamic Economics And Business*, Volume 6 No.1.

Yuliana dan Mellya Embun Baining, “Auditor Switching Secara Voluntary pada Perusahaan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017,” *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1, 28 Desember 2020.

Internet

Gunawanto, Opini WTP dan Korupsi, terdapat dalam <http://www.bpk.go.id/news/opiniwtp-dan-korupsi>. Juni. 22, 2017. Diakses tanggal 13 Desember 2021

Aditya Leksono Jati, Opini Laporan Keuangan BPK, terdapat dalam <http://www.kemendag.go.id/pusdiklat/news/kebijakan/3>. 2014. Diakses tanggal 13 Desember 2021.ⁱ